

AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT

Index: ASA 21/1851/2015
11 Juni 2015

Indonesia: Akhiri penangkapan semena-mena massal para pengunjung rasa damai di Papua

Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mengakhiri penangkapan-penangkapan semena-mena terhadap para aktivis politik Papua yang hanya menjalankan hak asasi mereka untuk berkumpul secara damai dan berekspresi di kawasan Papua. Siapa pun yang masih ditahan karena menjalankan secara damai hak asasinya harus segera dan tanpa syarat dibebaskan. Ratusan aktivis Papua, kebanyakan adalah anggota dan pendukung Komite Nasional Papua Barat (KNPB), ditangkap setelah organisasi ini menyerukan serangkaian aksi unjuk rasa damai. Aksi-aksi unjuk rasa ini digelar pada Mei 2015, sebagai bentuk dukungan aplikasi oleh sebuah kelompok payung pro-kemerdekaan Papua, *the United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), untuk bergabung ke *the Melanesian Spearhead Group* (MSG), sebuah organisasi antar-pemerintah kawasan sub-Pasifik.

Di provinsi Papua Barat, Polres Manokwari menangkap paling tidak 70 aktivis KNPB pada 20 Mei saat aksi unjuk rasa damai yang mana polisi memukul para pengunjung rasa dengan popor senapan. Tiga orang kemudian dikenai ancaman pidana penghasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum di bawah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada hari yang sama di Sorong, polisi menangkap dua aktivis KNPB ketika mereka mencoba membagikan selebaran yang mengajak orang ikut aksi unjuk rasa yang telah direncanakan di kota itu.

Di provinsi Papua, juga pada 20 Mei, enam aktivis KNPB ditangkap di Sentani ketika sedang membagikan selebaran tentang rencana aksi unjuk rasa esok harinya. Hari yang sama, tiga aktivis Papua ditangkap di Biak ketika mereka mencoba memberi tahu kepada polres setempat rencana aksi unjuk rasa. Tiga orang diancam pidana penghasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pada 21 Mei, polisi menangkap masing-masing 20 dan 27 aktivis KNPB di Biak Numfor dan Sentani, dalam aksi-aksi unjuk rasa yang damai.

Antara 26 Mei dan 3 Juni, paling tidak 90 aktivis Papua di Wamena, Jayapura, Nabire, Yahukimo, Jayawijaya, dan Sentani ditangkap. Polisi mengklaim bahwa penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan karena organisasi-organisasi yang bertanggung jawab tidak memiliki izin melakukan aksi unjuk rasa atau reli demonstrasi, dan karena mereka percaya bahwa KNPB berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Amnesty International prihatin bahwa akan ada penangkapan lagi di minggu-minggu ke depan menuju pertemuan tingkat tinggi MSG antara 24 dan 26 Juni 2015, yang akan membahas aplikasi ULMWP untuk bergabung ke MSG.

Sementara kebanyakan para aktivis yang ditangkap tersebut telah dibebaskan tanpa ancaman pidana, penangkapan semena-mena ini menyoroti situasi represif yang terus dihadapi para aktivis politik di wilayah Papua. Penangkapan semena-mena dan pengekangan terhadap hak untuk berkumpul secara damai dan berekspresi di Papua sekali lagi menyoroti kegagalan pemerintah Indonesia untuk bisa membedakan antara kelompok bersenjata dengan para aktivis damai yang mungkin mendukung kemerdekaan Papua, dan antara ekspresi suatu opini secara damai dengan tindak kekerasan fisik.

Penangkapan-penangkapan tersebut merupakan kemunduran setelah adanya harapan bahwa situasi HAM di kawasan Papua akan semakin baik setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke kawasan tersebut di awal Mei. Selama kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada dan membebaskan lima tahanan politik - yang divonis dan dipenjara lewat pengambilan pengakuan secara paksa dan berdasarkan proses hukum yang tidak adil - dan berjanji untuk memberikan grasi dan amnesti kepada para tahanan politik yang dipenjara di berbagai penjuru Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengumumkan bahwa pihak berwenang akan mencabut larangan bagi para jurnalis asing masuk dan mengizinkan mereka untuk mengakses Papua, bepergian secara bebas dan membuat laporan tentang kawasan tersebut.

Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun akan status politik suatu provinsi mana pun di Indonesia, termasuk menyerukan kemerdekaan. Namun demikian, Amnesty International menganggap hak atas kebebasan berekspresi melindungi hak untuk secara damai mengadvokasi kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk melakukan diskriminasi, kebencian, atau kekerasan.

Amnesty International mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan publik atas teritorinya. Namun demikian, hal ini harus menjamin bahwa segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik di mana Indonesia menjadi negara pihaknya. Lebih jauh, baik menurut hukum nasional Indonesia dan internasional, kelompok atau organisasi yang menggelar unjuk rasa publik hanya disyaratkan untuk melakukan pemberitahuan kepada kepolisian akan suatu aksi unjuk rasa damai, dan tidak memerlukan persetujuan atau izin. Namun demikian, aturan-aturan ini secara berulang-ulang diabaikan oleh pasukan keamanan di Papua yang terus melakukan pembatasan yang tidak sah terhadap berbagai bentuk aksi unjuk rasa damai terhadap negara oleh para mahasiswa, aktivis politik, dan organisasi HAM non-pemerintah. Di beberapa kasus, pasukan keamanan menggunakan kekerasan berlebih terhadap pengunjuk rasa damai, tetapi hal ini tidak diselidiki dan tidak ada tersangka pelaku yang dibawa ke muka hukum.

Latar belakang

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah sebuah organisasi payung yang didirikan pada Desember 2014 dan terbentuk dari berbagai faksi dari gerakan kemerdekaan Papua.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang didirikan sebagai sebuah pertemuan politik pada 1983, terdiri dari empat negara Melanesia Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, dan *the Kanak and Socialist National Liberation Front* (FLNKS) dari New Caledonia. Indonesia adalah anggota pengamat dari organisasi ini.